

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis :
Dwi Rahayu
Eha Hasni
Selly Puspita Sari
Candra Pramula Pinandita
Loso Judijanto



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, maka Penulisan Buku dengan judul Akuntansi Sektor Publik dapat diselesaikan.

Buku ini berisikan bahasan Dasar-dasar Akuntansi Sektor Publik, Penganggaran Sektor Publik, Akuntansi Kinerja Sektor Publik, Isu-isu Kontemporer dalam Akuntansi Sektor Publik.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.



Padang, Mei 2025
Penulis

NEXUSBOOKS.ID

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB 1 DASAR-DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	1
1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	1
1.2 Sifat dan Karakteristik Organisasi Sektor Publik ..	4
1.3 Pengguna Informasi Akuntansi Sektor Publik	6
1.4 Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Privat.....	7
1.5 Perbandingan Akuntansi Sektor Publik dan Privat	13
1.6 <i>Value For Money</i> (VFM)	14
1.7 Perkembangan Akuntansi Sektor Publik.....	16
1.8 Akuntansi Sektor Publik dan <i>Good Governance</i>	17
1.9 Akuntabilitas Publik	21
DAFTAR PUSTAKA	23
BAB 2 PENGANGGARAN SEKTOR PUBLIK	25
2.1 Konsep Dasar Penganggaran Sektor Publik.....	25
2.2 Proses Penganggaran.....	27
2.3 Jenis-Jenis Anggaran	30
2.4 Metode Penganggaran	33
2.5 Analisis Penganggaran	35
2.6 Keterlibatan Publik dalam Penganggaran	36
2.7 Penganggaran dan Kebijakan Fiskal.....	37
2.8 Pengawasan dan Evaluasi Penganggaran	39
2.9 Masalah dan Tantangan dalam Penganggaran Sektor Publik.....	40
DAFTAR PUSTAKA	43
BAB 3 PENGENDALIAN INTERN DALAM ORGANISASI PEMERINTAH	45
3.1 Pengertian Pengendalian Intern	45
3.2 Komponen Pengendalian Intern.....	46
3.3 Prinsip Umum Sistem Pengendalian Intern	49
3.4 Peran Pengendalian Intern dalam Organisasi Pemerintah.....	50

BAB 1

DASAR-DASAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Dwi Rahayu

1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Sektor publik berurusan dengan seluruh masyarakat. Organisasi sektor publik diwakili oleh organisasi-organisasi yang didirikan untuk menggunakan sumber daya suatu bangsa demi kesejahteraan dan kemakmuran warganya. Untuk pengelolaan yang terampil dalam pembangunan suatu negara, diperlukan penerapan sistem keuangan dan akuntansi dalam organisasi-organisasi yang bertanggung jawab atas keuangan dan sumber daya manusia. Dengan cara yang sama, sistem-sistem ini harus diperkenalkan dan dikembangkan dalam organisasi yang akan menggunakan dana untuk pembangunan nasional tersebut. Sistem yang diperkenalkan harus mendorong transparansi, penyimpanan dan pengambilan data, serta akuntabilitas. Organisasi sektor publik berbeda dari organisasi sektor swasta. Akibatnya, mereka memiliki ciri-ciri, tujuan, dan fungsi yang berbeda, yang menjelaskan metode informasi, penyebaran, dan akuntabilitas kepemimpinan mereka (Adams, 2006).

Akuntansi sektor publik berkaitan erat dengan penerapan sistem akuntansi yang berfokus pada entitas publik. Dibandingkan dengan sektor swasta, lingkungan sektor publik lebih luas dan kompleks karena mencakup berbagai jenis organisasi, seperti pemerintah pusat dan daerah, BUMN, BUMD, partai politik, LSM, institusi pendidikan, kesehatan, dan tempat ibadah. Organisasi sektor publik memiliki tujuan utama melayani masyarakat, bukan mencari keuntungan, dan sumber dayanya dikelola secara kolektif oleh publik. Secara umum, sektor publik dibagi menjadi dua kategori: organisasi nirlaba yang dimiliki oleh swasta, seperti yayasan, dan organisasi milik pemerintah, seperti rumah sakit atau universitas negeri.

BAB 5

ISU-ISU KONTEMPORER AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Oleh Loso Judijanto

5.1 Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar terpenting dalam pengelolaan keuangan sektor publik. Dalam konteks pemerintahan, transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses data dan proses yang relevan, sementara akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pejabat publik untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan masing-masing. Dalam lima tahun terakhir, isu-isu terkait kedua pilar ini semakin menjadi sorotan dalam akuntansi sektor publik, terutama di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat untuk pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.

Transparansi di sektor publik didefinisikan sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi terkait kebijakan, anggaran, dan pelaksanaan program-program publik. Hal ini mencakup penyediaan akses yang mudah bagi masyarakat terhadap laporan keuangan, pengeluaran pemerintah, dan proses pengambilan keputusan (Cordery and Hay, 2019). Transparansi bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan.

Akuntabilitas di sisi lain melibatkan kewajiban pejabat publik untuk memberikan penjelasan mengenai keputusan dan tindakan masing-masing serta menunjukkan bahwa pejabat publik tersebut menjalankan tugas dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan hukum (Greiling, 2019). Akuntabilitas dalam sektor publik memastikan bahwa dana publik digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dan memberi ruang bagi pengawasan oleh lembaga legislatif dan masyarakat.